

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah buah dari reformasi dalam upaya pemberdayaan daerah dan pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Menurut Yanto dan Astuti (2020) otonomi daerah merupakan hak pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah, mengontrol dan melaksanakan kebijakan daerah dan keuangan daerah. Dalam pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat memisahkan antara fungsi eksekutif dan legislatif, hal itu memberikan wewenang dan tanggungjawab yang luas terhadap pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan asas otonomi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki ke belanja-belanja daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, salah satu komponen belanja pemerintah adalah belanja modal. Belanja modal juga memegang peran penting oleh pemerintah daerah dalam menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas masyarakat daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana yang diberikan secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang akuntabel sesuai dengan undang-undang.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah memiliki sumber pembiayaan yang didapatkan pemerintah daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pemerintah pusat juga memberikan bantuan dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBN) yang dibagikan kepada daerah untuk dikelola guna pemerataan pembangunan daerah yang tertinggal.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua kembali mendapatkan perpanjangan otonomi khusus dari pemerintah pusat mulai dari 2022 sampai 2041. Perpanjangan tersebut berarti pemerintah pusat akan terus memberikan bantuan dana kepada Provinsi Papua. Terlihat pada *outlook* tahun 2022, total anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat mencapai Rp12,88 Triliun yang terdiri dari dana otonomi khusus sebesar Rp8,5 Triliun dan dana bantuan infrastruktur Rp4,37 Triliun, jumlah ini meningkat Rp949,2 Miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp11,93 Triliun. Kemudian di tahun berikutnya pada RAPBN 2023 pemerintah kembali menambahkan anggaran dana untuk Papua sebesar Rp405 Miliar (3,15%) dari tahun 2022. Akan tetapi besarnya dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke Provinsi Papua diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini terlihat dari banyaknya pejabat di Tanah Cenderawasih yang berurusan dengan KPK (<https://databoks.katadata.co.id>).

Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta kekayaan alam yang melimpah belum mampu dimanfaatkan secara

optimal. Berdasarkan data BPS kemiskinan di bumi Cenderawasih masih tinggi, persentase kemiskinan di Provinsi Papua masih di angka 26,03%. Kemiskinan di Papua meningkat tajam akibat penurunan ekonomi, perekonomian Papua sempat mengalami kontraksi pada kuartal I-2023 sebesar 2,39% (*yaer on year*) namun kemudian pada kuartal II-2023 tumbuh sebesar 3,41%. Tingkat kemiskinan terbuka di Papua juga melonjak menjadi 3,49% pada Februari 2023, naik dari 2,83% pada Agustus 2022.

Menurut Hany dan Mafruhah (2023) tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur mempunyai beberapa manfaat diantaranya sebagai penghubung antar wilayah, penyediaan listrik sebagai kebutuhan utama dalam produksi serta aksesibilitas terhadap air bersih dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan sebaik-baiknya sumber pendapatan daerah untuk pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis yang menentukan dalam mencapai tujuan bersama, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyusun anggarannya karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pada pengalokasiannya. Dalam konteks bisnis terdapat prinsipal dan agen yang memiliki peran utama dalam organisasi. Prinsipal memberi wewenang kepada agen sebagai perwakilan untuk mengelola organisasi guna mengadvokasi kepentingan pemilik. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen sering terjadi perbedaan kepentingan yang disebut

masalah keagenan (*agency problem*), di mana agen tidak berjalan sesuai dengan kepentingan prinsipal dan hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Andriyani *et al.*, 2020).

Dalam mengatur pembagian anggaran belanja daerah diantaranya termasuk belanja modal, ada banyak aspek yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi belanja dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah, aspek-aspek tersebut seperti kondisi keuangan daerah, wilayah dan perilaku oportunistik para pemangku kepentingan (Devi, 2022). Dari pernyataan tersebut terdapat pengaruh kondisi keuangan yang bisa dilihat melalui kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai alat untuk mengukur secara empiris keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran (Olandari, 2023). Kinerja keuangan bisa diukur dengan menggunakan alat analisis berupa rasio efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal. Untuk mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah tersebut, di mana setiap rupiah uang publik harus disalurkan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu diantaranya yaitu:

penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2019) di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 mengemukakan hasil bahwa kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Novita dan Nurhasanah (2020) pada Kab/Kota se-Jawa Barat tahun 2012-2017 menunjukkan rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan kontribusi BUMD berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap rasio belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal, sedangkan rasio tingkat pembiayaan silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Andriyani *et al.* (2020) di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 menunjukkan hasil kinerja keuangan daerah berupa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan efisien secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan rasio desentralisasi fiskal dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian di atas mengenai faktor yang mempengaruhi belanja modal sehingga hal ini yang mendorong peneliti untuk menguji kembali di daerah yang berbeda dengan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti dan Idayati (2020), namun yang menjadi pembeda

dengan peneliti terdahulu adalah lokasi dan tahun (periode). Di mana peneliti terdahulu dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2016-2018, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI PAPUA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
3. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
5. Apakah kinerja keuangan daerah berupa rasio efisiensi keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal.
5. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efisiensi keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung, diantaranya:

1. Bagi peneliti yaitu meningkatkan pemahaman mengenai kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.
2. Bagi akademik diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan data empiris terhadap ilmu akuntansi sektor publik khususnya

bahasan mengenai kinerja keuangan daerah dan pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

3. Bagi instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atas kebijakan pengalokasian belanja modal berdasarkan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi agar dapat membahas lebih dalam dan mengembangkan penelitian ini sehingga melengkapi kekurangan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan materi yang tertera dikelompokkan dalam sub bab mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran, sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang definisi operasional variabel, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh, serta interpretasi hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir, mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian. Serta bab ini juga berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya sesuai kesimpulan yang diperoleh.